

BAB V

Kesimpulan

Pada tahun 2015, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pencari suaka etnis Rohingya mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dihasilkan oleh desakan dari berbagai aktor yang memiliki keinginan agar kebijakan Indonesia yang awalnya menolak menjadi menerima pencari suaka etnis Rohingya di Indonesia. Proses perubahan ini dipengaruhi oleh sumber-sumber perubahan baik secara domestik maupun internasional.

Di tingkat domestik, berbagai aktor seperti birokrasi, partai politik, opini publik, dan kelompok kepentingan seperti SUAKA dan LBH Jakarta memainkan peran penting. Birokrasi, melalui Kementerian Luar Negeri, berkoordinasi dengan negara tetangga dan organisasi internasional, sementara opini publik melakukan aksi kemanusiaan dan kampanye melalui media sosial. Media, seperti Kompas(dot)com dan VOA Indonesia menunjukkan topik mengenai pencari suaka etnis Rohingya menjadi bahan perbincangan sehingga adanya peningkatan dari berita yang dihasilkan saat krisis terjadi.

Secara internasional, berbagai aktor global dan regional ikut berperan. OHCHR dan IOM memberikan data dan saran mengenai krisis pencari suaka serta turut menandatangani petisi untuk mendesak pemerintah Indonesia melakukan penerimaan pencari suaka bersama dengan UNHCR dan SRSG. Lalu, ASEAN sebagai organisasi regional berperan mengkoordinasikan respons regional melalui pertemuan menteri ketiga negara terdampak krisis, yaitu Indonesia, Malaysia dan

Thailand di Malaysia. Aktor non-negara seperti UNHCR juga aktif dalam memberikan saran, melakukan advokasi dan agenda pertemuan dengan pemerintah Indonesia dalam upaya untuk menekan pemerintah Indonesia mengubah kebijakan luar negerinya.

Keterkaitan antara sumber-sumber perubahan domestik dan internasional dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pencari suaka Rohingya menunjukkan adanya interaksi yang kompleks. Teori *two-level games* yang diadopsi oleh Eidenfalk dalam teori *foreign policy change* menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh tekanan domestik dan internasional dan titik keterkaitannya berada pada berhasilnya negara untuk meratifikasi kebijakan luar negerinya menjadi aturan hukum negara.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memiliki peran penting sebagai pembuat kebijakan. Dengan analisis jendela kesempatan, dapat diketahui bahwa Joko Widodo memiliki pendekatan diplomasi yang mengutamakan pada kepentingan dalam negara namun tetap responsif terhadap isu global. Meskipun awalnya terdapat kekhawatiran akan keamanan nasional dan ketidaksiapan ekonomi, partisipasi Indonesia dalam pertemuan regional memperkuat komitmen terhadap penyelesaian krisis pencari suaka ini.

Perubahan kebijakan ini tidak terlepas dari adanya jendela kesempatan yang kemudian dijadikan negara sebagai momentum perubahan kebijakannya. Momen tersebut didapatkan oleh Indonesia setelah berpartisipasi dalam pertemuan *Ministerial Meeting* di Malaysia dan menghasilkan *Joint Statement* yang kemudian mengubah kebijakan penolakan menjadi penerimaan terhadap pencari suaka etnis

Rohingya di Indonesia. Secara keseluruhan, kompleksitas dan keterkaitan antara sumber-sumber perubahan domestik dan internasional dalam dinamika kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pencari suaka etnis Rohingya mengilustrasikan bagaimana interaksi aktor dan faktor global, regional, dan bilateral menjadi kunci dalam menanggapi tantangan krisis kemanusiaan di Indonesia.